JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

# IMPLEMENTASI WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DI DESA SUNGAI NAMANG KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**Penny Mutia[1], Siti Raudah[2], Nurul Hasanah[3]**
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: fenymutia20@gmail.com

**ABSTRAK**

Website desa merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara lebih mudah dan luas. Dalam pelaksanaannya di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terdapat beberapa permasalahan. Pertama, keberadaan dan fungsi website desa belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Kedua, informasi pada website belum lengkap dan belum diperbarui secara menyeluruh. Ketiga, pembaruan informasi pada website Desa Sungai Namang belum dilakukan secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan melibatkan 12 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator yang cukup baik yaitu: pertama, staf; kedua, wewenang; ketiga, fasilitas; dan keempat, sikap pelaksana. Indikator yang belum baik yaitu: pertama, transmisi; kedua, kejelasan; ketiga, konsistensi; keempat, informasi; kelima, komitmen; keenam, SOP; dan ketujuh, fragmentasi. Faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website desa, keterbatasan anggaran dalam mendukung pengelolaan website desa, dan kurangnya komitmen dalam pengelolaan website desa. Faktor pendukung adalah tersedianya website desa sebagai media informasi publik serta tersedianya sarana teknologi dalam mendukung pengelolaan website desa.

Disarankan kepada Pemerintah Desa Sungai Namang agar meningkatkan pengelolaan website desa dengan memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, menyusun SOP khusus, serta meningkatkan koordinasi dalam pembaruan informasi. Kepada aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan website agar lebih berkomitmen dalam memperbarui dan melengkapi informasi secara berkelanjutan. Kepada Pemerintah Desa juga diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi website desa kepada masyarakat agar website dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik.

**Kata Kunci**: Implementasi, Website Desa, Media Informasi Publik

***ABSTRACT***

The village website is one of the media that can be utilized by the village government to disseminate public information to the community more easily and broadly. However, its implementation in Sungai Namang Village, Danau Panggang Subdistrict, Hulu Sungai Utara Regency, still faces several problems. First, the existence and function of the village website have not been widely disseminated to the community. Second, the information available on the website is not yet complete and has not been comprehensively updated. Third, updates to the Sungai Namang Village website have not been carried out regularly. This study aims to determine the implementation

of the village website as a public information medium in Sungai Namang Village, Danau Panggang Subdistrict, Hulu Sungai Utara Regency, as well as the factors influencing its implementation.

This study used a qualitative approach with a descriptive design. Informants were selected using purposive sampling, involving 12 informants. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility was tested through prolonged observation, increased persistence, triangulation, the use of reference materials, and member checking.

The results showed that the implementation of the village website as a public information medium in Sungai Namang Village, Danau Panggang Subdistrict, Hulu Sungai Utara Regency, has not been implemented well. The indicators categorized as fairly good were: first, staff; second, authority; third, facilities; and fourth, implementers' attitudes. The indicators categorized as not good were: first, transmission; second, clarity; third, consistency; fourth, information; fifth, commitment; sixth, standard operating procedures (SOPs); and seventh, fragmentation. The inhibiting factors were lack of coordination in village website management, limited budget to support village website management, and lack of commitment in managing the village website. The supporting factors were the availability of the village website as a public information medium and the availability of technological facilities to support village website management.

It is recommended that the Sungai Namang Village Government improve website management by clarifying the division of tasks and responsibilities, developing specific SOPs, and improving coordination in updating information. Village officials involved in website management are encouraged to strengthen their commitment to updating and completing information on a continuous basis. The Village Government is also expected to increase socialization regarding the existence and function of the village website so that it can be utilized as a public information medium.

***Keywords***: *Implementation, Village Website, Public Information Media*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat, luas, transparan, dan mudah diakses. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung keterbukaan informasi publik melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mudah diperoleh dan diakses.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa adalah website desa. Website desa dapat digunakan sebagai media informasi publik yang memuat profil desa, berita atau kegiatan desa, pengumuman, dokumentasi kegiatan, serta berbagai informasi lain yang perlu diketahui masyarakat. Keberadaan website memberikan alternatif bagi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga penyampaian informasi tidak hanya dilakukan secara langsung di kantor desa. Oleh karena itu, keberadaan website desa tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sarana teknologi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa mengelola, memperbarui, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa masih menghadapi berbagai permasalahan. Pangaribowo (2023) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Desa Digital dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” menunjukkan bahwa pelaksanaan desa digital masih menghadapi permasalahan dalam komunikasi dan penerapan SOP. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan teknologi di tingkat desa membutuhkan komunikasi yang jelas serta pedoman kerja yang mendukung pelaksanaannya.

Selanjutnya, Linda Afriani (2024) dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar" menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi publik berbasis website di Desa Rimba Makmur tergolong cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kurangnya sosialisasi dan koordinasi, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya informasi yang tersedia pada website, serta belum adanya insentif dalam pengelolaan website. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi website sebagai media informasi publik dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan kondisi implementasi yang ditemukan.

Desa Sungai Namang merupakan salah satu desa di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memiliki website desa sebagai salah satu media penyampaian informasi kepada masyarakat. Website tersebut memuat informasi mengenai profil desa, berita atau kegiatan pemerintahan desa, serta dokumentasi kegiatan masyarakat. Namun, keberadaan website tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan informasi yang berjalan secara teratur. Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, keberadaan dan fungsi website desa belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, informasi pada website belum lengkap dan belum diperbarui secara menyeluruh, serta pembaruan informasi pada website Desa Sungai Namang belum dilakukan secara rutin. Beberapa informasi desa, seperti visi dan misi serta struktur organisasi, belum diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan website saja belum cukup untuk menjadikan website sebagai media informasi publik yang dapat dimanfaatkan secara baik. Pengelolaan website juga membutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan website Desa Sungai Namang belum didukung dengan pembagian tugas yang secara khusus mengatur pengumpulan, pemeriksaan, pembaruan, dan penyampaian informasi melalui website. Selain itu, belum tersedia SOP khusus yang menjadi pedoman dalam pengelolaan website desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa fenomena masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, yaitu: pertama, keberadaan dan fungsi website desa belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Kedua, iformasi pada website belum lengkap dan belum diperbarui secara menyeluruh. Ketiga, pembaruan informasi pada website Desa Sungai Namang belum dilakukan secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penelitian bukan terletak pada tidak tersedianya website, melainkan pada bagaimana website yang telah tersedia tersebut diimplementasikan sebagai media informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam Agustino (2022), yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Website Desa

Sebagai Media Informasi Publik Di Desa Sungai Namang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menggambarkan kondisi pengelolaan website, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Sungai Namang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut telah memiliki website yang dapat digunakan sebagai media informasi publik, tetapi pemanfaatan dan pengelolaannya belum berjalan dengan baik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 12 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Keamanan, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta 7 orang masyarakat Desa Sungai Namang. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, profil desa, website desa, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2023). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan data yang berkaitan dengan implementasi website desa sebagai media informasi publik. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan indikator penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, penggunaan bahan referensi, serta member check (Sugiyono, 2023).

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Website Desa Sebagai Media Informasi Publik Di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori yang digunakan dalam Implementasi Website Desa sebagai Media Informasi Publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2022:154–158) yaitu :

#### 1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak yang memberikan informasi kepada pihak yang menerima informasi. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, transmisi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai keberadaan, fungsi, dan pemanfaatan website desa disampaikan kepada aparatur desa dan masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa transmisi informasi mengenai keberadaan dan pemanfaatan website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang belum baik. Hal ini dilihat dari belum adanya penyampaian informasi atau sosialisasi secara luas dan terstruktur mengenai keberadaan dan fungsi website kepada seluruh aparatur desa maupun masyarakat. Pengetahuan mengenai website masih lebih banyak diketahui oleh aparatur tertentu yang terlibat dalam pengelolaannya. Selain itu, masyarakat belum seluruhnya mengetahui bahwa Desa Sungai Namang memiliki website yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai desa. Sebagian masyarakat masih memperoleh informasi dengan datang langsung ke kantor desa atau melalui

penyampaian dari aparatur dan lingkungan sekitar. Berdasarkan observasi, website desa memang telah tersedia dan dapat diakses, tetapi belum ditemukan kegiatan sosialisasi yang secara khusus memperkenalkan keberadaan, fungsi, dan cara mengakses website kepada masyarakat.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan penyampaian informasi yang dapat dipahami oleh pihak yang menerima informasi. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, kejelasan berkaitan dengan sejauh mana aparatur desa dan masyarakat memahami keberadaan, fungsi, tujuan, serta pemanfaatan website desa sebagai media untuk memperoleh dan menyampaikan informasi publik

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa kejelasan informasi mengenai fungsi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang belum baik. Hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami secara jelas keberadaan dan fungsi website desa sebagai sumber informasi publik. Masyarakat yang telah mengetahui keberadaan website juga belum terbiasa mengaksesnya secara rutin. Selain itu, informasi mengenai jenis informasi yang tersedia dan pemanfaatan website belum dijelaskan secara luas kepada masyarakat. Berdasarkan observasi, website telah menyediakan beberapa informasi mengenai profil dan kegiatan desa, tetapi informasi yang tersedia belum seluruhnya lengkap dan diperbarui.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara jelas keberadaan dan fungsi website desa sebagai sumber informasi publik. Sebagian masyarakat yang mengetahui website juga belum terbiasa mengaksesnya secara rutin. Berdasarkan observasi, website telah menyediakan beberapa informasi mengenai desa, tetapi informasi yang tersedia belum seluruhnya lengkap dan diperbarui. Menurut Edwards III dalam Agustino (2022), kejelasan pesan merupakan unsur penting dalam implementasi karena pelaksana dan kelompok sasaran perlu memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, indikator kejelasan dikategorikan belum baik.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan penyampaian informasi secara tetap dan berkelanjutan sehingga informasi yang diberikan tidak berubah-ubah dan tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, konsistensi berkaitan dengan keberlanjutan penyampaian dan pembaruan informasi yang terdapat pada website desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa konsistensi penyampaian informasi melalui website desa di Desa Sungai Namang sudah belum baik. Hal ini dilihat dari adanya beberapa informasi kegiatan desa yang telah dimuat pada website, seperti kegiatan Posyandu dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya informasi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa website telah dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pembaruan informasi belum dilakukan pada seluruh bagian website. Beberapa informasi profil dan pemerintahan desa belum diperbarui sesuai dengan keadaan terbaru. Dengan demikian, penyampaian informasi melalui website sudah dilakukan, tetapi belum mencakup seluruh informasi yang seharusnya diperbarui secara berkala.

**2. Sumber Daya**

a. Staf

Staf merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, staf berkaitan dengan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan perangkat teknologi serta mengakses dan mengelola website desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa staf dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Hal ini dilihat dari adanya aparatur desa yang mampu menggunakan komputer, laptop, jaringan internet, dan perangkat teknologi lainnya. Terdapat pula aparatur yang mengetahui dan mampu mengakses serta mengelola website desa. Kemampuan tersebut menjadi pendukung dalam pengelolaan website sebagai media informasi publik. Namun, pengelolaan website masih bergantung pada aparatur tertentu dan belum didukung dengan pembagian tugas khusus yang jelas. Pengelolaan informasi pada website belum menjadi tanggung jawab khusus yang melekat pada satu petugas atau tim tertentu. Berdasarkan observasi, aparatur desa telah terbiasa menggunakan komputer dan laptop dalam pekerjaan pemerintahan serta memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi dalam pekerjaan administrasi.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan karena informasi menjadi dasar bagi pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, informasi berkaitan dengan ketersediaan, kelengkapan, dan keterbaruan informasi yang disampaikan melalui website desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa informasi dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang belum baik. Hal ini dilihat dari website desa yang telah memuat beberapa informasi kegiatan, seperti kegiatan Posyandu dan penyaluran BLT, tetapi belum seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara lengkap. Beberapa bagian informasi mengenai profil dan pemerintahan desa juga belum diperbarui. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, informasi mengenai visi dan misi serta struktur organisasi setelah adanya perubahan aparatur belum diperbarui pada website.

c. Wewenang

Wewenang merupakan kewenangan yang diberikan kepada pelaksana untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, wewenang berkaitan dengan adanya kewenangan yang jelas dalam mengelola, memeriksa, memperbarui, dan menyampaikan informasi melalui website desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa wewenang dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur desa yang secara umum telah memiliki tugas dan wewenang berdasarkan jabatan masing-masing, dengan adanya Kasi Pemerintahan yang memegang dan mengelola website desa. Dengan adanya aparatur yang bertanggung jawab tersebut, pengelolaan website telah memiliki pihak yang menjalankan kewenangan dalam mengakses dan memperbarui informasi yang disampaikan melalui website. Namun, kewenangan tersebut belum didukung dengan pembagian tugas yang lebih rinci mengenai proses pemeriksaan, pembaruan, dan penyampaian informasi. Dengan

demikian, kewenangan dalam pengelolaan website sudah terdapat pada aparatur tertentu, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya terperinci.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, fasilitas berkaitan dengan ketersediaan komputer, laptop, jaringan internet, printer, dan sarana pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengelola website desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa fasilitas dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Hal ini dilihat dari tersedianya sarana dasar berupa komputer, laptop, printer, jaringan internet, serta perangkat pendukung lainnya. Fasilitas tersebut dapat digunakan aparatur untuk mengakses, mengelola, dan memperbarui informasi pada website desa. Tersedianya perangkat komputer atau laptop dan jaringan internet memberikan dasar yang cukup untuk mengakses media informasi publik desa. Dengan demikian, persoalan utama implementasi website bukan terletak pada ketiadaan sarana dasar, tetapi lebih pada pengelolaan, pembagian tanggung jawab, kelengkapan informasi, dan keberlanjutan pembaruan website.

**3. Disposisi**

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan sikap atau penerimaan pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, sikap pelaksana berkaitan dengan penerimaan dan dukungan aparatur desa terhadap keberadaan website sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa sikap pelaksana terhadap keberadaan website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur desa yang pada dasarnya menerima dan mendukung keberadaan website karena website dapat membantu pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan profil desa kepada masyarakat. Aparatur yang mengetahui dan memiliki akses terhadap website juga telah menggunakan fasilitas yang tersedia untuk mengelola atau memperbarui beberapa informasi. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam pengelolaan website secara menyeluruh dan teratur. Masih terdapat informasi yang belum diperbarui dan belum ada pengaturan khusus yang memastikan pengelolaan website dilakukan secara berkelanjutan.

Masyarakat pada dasarnya dapat menerima keberadaan website sebagai media untuk memperoleh informasi desa. Namun, pemanfaatannya belum merata karena sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan website atau belum terbiasa mengaksesnya. Berdasarkan observasi, aparatur desa bersikap positif terhadap keberadaan website, tetapi dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan informasi yang lengkap dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam bentuk tindakan pengelolaan yang konsisten.

b. Komitmen

Komitmen merupakan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara berkelanjutan. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, komitmen berkaitan dengan kesungguhan aparatur dalam mengelola

website, memperbarui informasi, dan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai dengan keadaan desa.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi memperlihatkan bahwa sikap pelaksana terhadap keberadaan website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Aparatur desa mendukung keberadaan website, tetapi belum terdapat komitmen yang dituangkan dalam penugasan, mekanisme kerja, dan pembaruan informasi secara teratur. Pengelolaan website masih dilakukan oleh aparatur tertentu sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan sistem kerja khusus yang memastikan seluruh informasi publik diperbarui secara berkala. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam pengelolaan website secara menyeluruh dan teratur. Masih terdapat informasi yang belum diperbarui dan belum terdapat pengaturan khusus yang memastikan pengelolaan website dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan observasi, aparatur desa menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan website, tetapi dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan informasi yang lengkap dan berkelanjutan.

**4. Struktur Birokrasi**

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar pelaksana memiliki tata cara dan alur kerja yang jelas. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, SOP berkaitan dengan adanya pedoman mengenai proses pengumpulan, pemeriksaan, pengunggahan, pembaruan, dan penyebarluasan informasi melalui website desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pengelolaan website desa sebagai media informasi publik belum tersedia. Pemerintah Desa Sungai Namang memang memiliki mekanisme kerja dan SOP untuk kegiatan administrasi pemerintahan tertentu, tetapi belum ditemukan SOP yang secara khusus mengatur proses pengelolaan website. SOP khusus tersebut seharusnya dapat mengatur proses pengumpulan informasi, pemeriksaan atau verifikasi, penulisan, pengunggahan, pembaruan, dan penyebarluasan informasi melalui website. Ketiadaan SOP khusus menyebabkan pengelolaan website belum memiliki pedoman tertulis yang seragam. Aparatur yang mengelola website menjalankan kegiatan berdasarkan tugas dan pemahaman yang dimiliki, sehingga proses pembaruan informasi belum berjalan secara teratur. Berdasarkan kondisi tersebut, indikator SOP dikategorikan belum baik.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi, peneliti belum menemukan dokumen SOP yang secara khusus mengatur pengelolaan website desa sebagai media informasi publik. Informasi yang dimuat pada website telah tersedia pada beberapa bagian, tetapi belum terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan alur pengelolaannya. Menurut Edwards III dalam Agustino (2022), struktur birokrasi yang jelas diperlukan untuk memberikan pedoman kerja kepada pelaksana. Oleh karena itu, penyusunan SOP khusus website diperlukan agar pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan konsisten.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dan tugas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik, fragmentasi berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab aparatur dalam mengumpulkan, memeriksa, mengunggah, memperbarui, dan memantau informasi pada website desa.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang cukup baik. Secara umum, aparatur Desa Sungai Namang telah memiliki pembagian tugas berdasarkan jabatan masing-masing. Namun, pembagian tanggung jawab khusus mengenai siapa yang mengumpulkan informasi, memeriksa kebenaran informasi, mengunggah informasi, memperbarui informasi, dan memantau website belum ditetapkan secara jelas. Pengelolaan website masih dilakukan oleh aparatur tertentu yang memiliki akses dan kemampuan untuk mengelolanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas umum organisasi sudah ada, tetapi fragmentasi khusus untuk pengelolaan website belum terbentuk. Oleh karena itu, indikator fragmentasi dikategorikan belum baik.

**B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Website Desa Sebagai Media Informasi Publik di Desa Sungai Namang**

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya Koordinasi Dalam Pengelolaan Website Desa

      Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website desa menjadi salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan website sebagai media informasi publik. Koordinasi diperlukan agar aparatur desa memiliki kesamaan pemahaman mengenai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, serta waktu pembaruan informasi pada website.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang adalah kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kesamaan pemahaman di antara aparatur desa mengenai pengelolaan website serta informasi yang perlu dimuat dan diperbarui. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan website belum berjalan secara terkoordinasi dan masih bergantung pada aparatur tertentu yang mengetahui dan dapat mengakses website.

   b. Keterbatasan Anggaran Dalam Mendukung Pengelolaan Website Desa

      Anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberlangsungan pengelolaan website desa. Ketersediaan anggaran diperlukan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, peningkatan kemampuan aparatur, serta pengembangan pengelolaan website desa.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang. Keterbatasan anggaran dapat memengaruhi dukungan terhadap pengelolaan website, terutama dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan pengelolaan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan website belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

c. Kurangnya Komitmen Dalam Pengelolaan Website Desa

Komitmen aparatur diperlukan agar website desa dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai media informasi publik. Komitmen tersebut dapat dilihat dari kesediaan aparatur untuk menjalankan tanggung jawab dalam mengelola, memperbarui, dan menyampaikan informasi melalui website desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kurangnya komitmen dalam pengelolaan website menjadi salah satu faktor penghambat implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pengelolaan website yang dilakukan secara khusus dan berkelanjutan serta belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pembaruan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan website belum sepenuhnya dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai media informasi publik.

2. Faktor Pendukung

a. Tersedianya Website Desa Sebagai Media Informasi Publik

Ketersediaan website desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi website sebagai media informasi publik. Dengan adanya website, pemerintah desa telah memiliki sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tersedianya website desa merupakan salah satu faktor pendukung implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang. Hal ini dapat dilihat dari adanya website desa yang telah digunakan untuk memuat berbagai informasi mengenai desa, seperti profil desa, berita kegiatan, dan dokumentasi kegiatan desa. Keberadaan website tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi publik melalui media berbasis internet.

b. Tersedianya Sarana Teknologi Dalam Mendukung Pengelolaan Website Desa

Ketersediaan sarana teknologi merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan website desa. Sarana seperti komputer, laptop, dan jaringan internet dapat membantu aparatur desa dalam mengakses dan mengelola informasi yang akan disampaikan melalui website.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tersedianya sarana teknologi menjadi salah satu faktor pendukung implementasi website desa sebagai media informasi publik di Desa Sungai Namang. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer, laptop, dan jaringan internet yang dapat digunakan oleh aparatur desa untuk mengakses website. Dengan adanya sarana tersebut, pemerintah desa memiliki fasilitas dasar yang dapat menunjang pengelolaan website sebagai media informasi publik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian mengenai Implementasi Website Desa sebagai Media Informasi Publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa belum berjalan dengan baik. Teori George C. Edwards III dalam Agustino (2022), pada variabel komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi, seluruhnya dikategorikan belum baik karena belum terdapat sosialisasi yang luas mengenai keberadaan dan fungsi website, masyarakat belum memahami dan terbiasa mengakses

website, serta pembaruan informasi belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada variabel sumber daya, indikator staf, wewenang, dan fasilitas dikategorikan cukup baik, sedangkan indikator informasi dikategorikan belum baik. Aparatur desa telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi dan terdapat Kasi Pemerintahan yang mengelola website, serta sarana teknologi telah tersedia. Namun, informasi yang terdapat pada website belum seluruhnya lengkap dan diperbarui. Pada variabel disposisi, sikap pelaksana dikategorikan cukup baik, sedangkan komitmen dalam pengelolaan website belum baik karena belum terdapat penugasan dan mekanisme kerja yang memastikan pengelolaan serta pembaruan informasi dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, pada variabel struktur birokrasi, indikator SOP dan fragmentasi dikategorikan belum baik karena belum tersedia SOP khusus pengelolaan website dan belum terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan informasi website. Faktor penghambat implementasi website desa meliputi kurangnya koordinasi dalam pengelolaan website, keterbatasan anggaran dalam mendukung pengelolaan website, dan kurangnya komitmen dalam pengelolaan website. Adapun faktor pendukungnya adalah tersedianya website desa sebagai media informasi publik serta tersedianya sarana teknologi dalam mendukung pengelolaan website desa. Dengan demikian, keberadaan website dan ketersediaan sarana teknologi telah menjadi dasar pendukung implementasi, tetapi masih diperlukan perbaikan dalam komunikasi, pengelolaan informasi, komitmen, SOP, dan pembagian tanggung jawab agar website dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai media informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Afriani, L. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kristian. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika*, 21(2), 45–62.

Napitupulu, D. (2020). Kajian faktor sukses implementasi e-government. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(1), 13–19.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Sinambela, L. P. (2022). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suaedi, F., & Rahardian, R. (2023). *Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Era Governance: Teori, Isu, dan Kompleksitas*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Jember.

Taufiq, R. (2021). Tantangan digitalisasi pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 112–128.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.